



# **PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dapat tersusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam rangka penyesuaian arah kebijakan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Bupati terpilih periode 2025-2029. Perubahan Rencana Aksi Tahun 2025 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang didasari pada kondisi, potensi, permasalahan dan tujuan pembangunan daerah Tahun 2025.

Pada awal tahun 2025 Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Sehingga seluruh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran.

Semoga Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Singaparna, November 2025  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Tasikmalaya



**Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M**  
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....3

    1.1 Latar Belakang .....3

    1.2 Maksud dan Tujuan.....6

    1.3 Sistematika Penulisan .....7

BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....8

    2.1 Rencana Kerja (RENJA).....8

    2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....8

    2.3 Perjanjian Kinerja.....12

BAB III PERUBAHAN RENCANA AKSI.....15

BAB IV PENUTUP.....25

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2025 pada awalnya disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat dinamika kebijakan dan kondisi yang menuntut penyesuaian terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Perubahan kebijakan nasional maupun daerah terkait pengelolaan keuangan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta penyesuaian terhadap sistem pengelolaan berbasis digital mengharuskan adanya penyesuaian strategi pelaksanaan program. Selain itu, terdapat perubahan prioritas pembangunan daerah, penyesuaian struktur anggaran, perkembangan regulasi perpajakan daerah, serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya yang perlu diakomodasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2025.

Aspek internal organisasi seperti perubahan struktur, ketersediaan SDM, kapasitas perangkat daerah, serta penguatan proses monitoring dan evaluasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi perlunya penyempurnaan dokumen Rencana Aksi. Kondisi tersebut menuntut BPKPD melakukan review terhadap capaian program, indikator kinerja, serta tahapan kegiatan agar pelaksanaan pada tahun berjalan tetap relevan, adaptif, efektif, dan akuntabel. Dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap Rencana Aksi BPKPD Tahun 2025 sebagai upaya penyelarasan dengan kebijakan terbaru, peningkatan efektivitas capaian kinerja, serta untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Perubahan Rencana Aksi Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Perubahan Rencana Aksi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam melaksanakan program/kegiatan pada DPPA Tahun Anggaran 2025 serta program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025.

Perubahan Rencana Aksi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

- 1) Penyesuaian arah kebijakan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Bupati terpilih periode Tahun 2025 – 2029;
- 2) Terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Hal yang harus dilakukan efisiensi berdasarkan Inpres tersebut diantaranya:
  - a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
  - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen);
  - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
  - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur; dan



- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Terdapat perubahan prioritas program kegiatan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029;
- 4) Terdapat perubahan target pada indikator kinerja tujuan BPKPD untuk tahun 2025-2026 berdasarkan hasil revidi oleh TIM Revidi IKU bahwa hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 telah melampaui target pada tahun 2025 dan 2026, sehingga Perlu melakukan penyesuaian target;
- 5) Terdapat perubahan target pada indikator kinerja utama BPKPD untuk tahun 2025-2026 berdasarkan hasil revidi oleh Tim Revidi IKU diantaranya:
  - a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  
Capaian Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat pada tahun 2024 memperoleh nilai 87,52 kategori A atau predikat "Sangat Baik". Capaian tersebut juga telah melampaui target pada tahun 2025, maka perlu menetapkan target nilai RB di atas capaian Tahun 2024 untuk tahun 2025-2026;
  - b. Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan  
Jumlah Bidang Tanah dan Kendaraan mengalami perubahan pada tahun 2024. Perubahan tersebut dikarenakan adanya revisi hasil dari temuan BPK RI, pemeriksaan lapangan, perhitungan MCP, Hibah dari PSU, hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta adanya belanja modal tanah/bangunan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), terdapat perubahan jumlah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimana sebelumnya jumlah kendaraan sebanyak 3.240 unit kendaraan menjadi 2.911 unit kendaraan. Perubahan data akan berpengaruh secara signifikan terhadap capaian indikator Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan sehingga perlu penyesuaian target pada tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan data yang tersedia;
  - c. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat

penambahan jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan pajak itu yaitu Opsen PKB dan BBNKB, sehingga terdapat penambahan target penerimaan pajak daerah yang meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 6) Terdapat rasionalisasi anggaran sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran dan kebijakan anggaran karena adanya defisit anggaran yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 7) Penambahan atau pengurangan target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan, serta penambahan/pengurangan dan pergeseran pagu anggaran sub kegiatan;
- 8) Terdapat penambahan sub kegiatan dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan pengelolaan Retribusi; dan
- 9) Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran BPKPD Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2025 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran startegis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mempermudah dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2025; dan
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi.

## 1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan doumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebagai berikut:

|                                                    |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bab I Pendahuluan</b>                           | Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.                                                                                   |
| <b>Bab II Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja</b> | Menyajikan mengenai Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025. |
| <b>Bab III Perubahan Rencana Aksi</b>              | Menyajikan Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.                                        |
| <b>Bab IV Penutup</b>                              | Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan Perubahan Rencana Aksi.                                                                   |



## BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Kerja (RENJA)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur penunjang pengelola keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima”**. BPKPD memiliki tugas yang strategis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati, untuk menunjang tujuan strategis tersebut maka disusunlah sasaran strategis agar tujuan tersebut tercapai.

### 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai dengan periode Renstra yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 100.1.6/KEP.17/BPKPD/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor PR.10.06/ Kep.60/ BPKPD/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama  
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Tahun 2021-2026

| No | Tujuan                                                                            | Indikator Tujuan                   | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja |       |        |       |       |       | Sasaran                                                                          | Indikator Sasaran                                                                    | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja |      |      |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|------|------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                   |                                    |        | 2020         | 2021           | 2022  | 2023   | 2025  | 2025  | 2026  |                                                                                  |                                                                                      |        | 2020         | 2021           | 2022 | 2023 | 2025  | 2025  | 2026  |
| I  | Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai  | 59,06        | 66,489         | 67,50 | 78,019 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                           | Nilai  | N/A          | N/A            | 65   | 69   | 78,25 | 87,60 | 87,75 |
|    |                                                                                   |                                    |        |              |                |       |        |       |       |       | Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel             | Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan | %      | 100          | 100            | 100  | 100  | 100   | 100   | 100   |

[illegible]

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja (PK)**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                                                                             | 87,60  |
| 2. | Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel               | Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100%   |
| 3. | Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib                                    | Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan                                                                  | 83,49% |
| 4. | Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah                                             | Persentase pertumbuhan pajak daerah                                                                                                                    | 51,16% |

Tabel 2.3

**Perubahan Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis  
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA                    | TARGET | PROGRAM                                                     | KEGIATAN                                                              | PAGU ANGGARAN<br>(Rp) |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|    |                                                                                   |                                            |        |                                                             |                                                                       | Sebelum<br>Perubahan  | Setelah Perubahan  |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 87,60  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       | 38.816.554.467,00     | 36.075.953.162,00  |
|    |                                                                                   |                                            |        |                                                             | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 233.000.000,00        | 173.047.953.162,00 |
|    |                                                                                   |                                            |        |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 32.126.913.147,00     | 30.108.238.872,00  |
|    |                                                                                   |                                            |        |                                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 482.425.800,00        | 149.290.000,00     |
|    |                                                                                   |                                            |        |                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 2.438.801.037,00      | 1.831.962.707,00   |
|    |                                                                                   |                                            |        |                                                             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah             | 424.801.200,00        | 514.901.200,00     |
|    |                                                                                   |                                            |        |                                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 1.838.950.000,00      | 1.836.850.000,00   |
|    |                                                                                   |                                            |        |                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.271.663.283,00      | 1.461.663.283,00   |



## PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

|    |                                                                     |                                                                                                                                                        |        |                                         |                                                                    |                    |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2. | Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel | Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100%   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah     |                                                                    | 704.787.153.003,00 | 698.228.526.542,00 |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                        |        |                                         | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                  | 2.662.640.000,00   | 2.294.756.500,00   |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                        |        |                                         | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   | 531.261.000,00     | 404.198.000,00     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                        |        |                                         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 709.300.000,00     | 538.751.500,00     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                        |        |                                         | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | 700.883.952.003,00 | 694.990.820.542,00 |
| 3. | Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib                      | Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan                                                                  | 83,49% | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                    | 1.773.202.000,00   | 1.516.293.500,00   |
| 4. | Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah                               | Persentase pertumbuhan pajak daerah                                                                                                                    | 51,16% | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                             | 6.769.099.844,00   | 5.112.067.770      |

Sumber: BPKPD 2025, diolah

**BAB III PERUBAHAN RENCANA AKSI**

Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala. Adapun Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.1  
PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS                                                                 | INDIKATOR KINERJA SASARAN |                           | TARGET KINERJA SASARAN | TARGET |       |        |       | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                 | AKTIVITAS                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                              | SATUAN       | TARGET KEGIATAN | TARGET BULAN KE- |        |         |        |        |          |        |        |          |        |        |          | PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |                           |                           |                        | TW I   | TW II | TW III | TW IV |                                                                 |                                                                                  |                                                                                |              |                 | 1                | 2      | 3       | 4      | 5      | 6        | 7      | 8      | 9        | 10     | 11     | 12       |                                    |                  |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 1                         | Nilai Reformasi Birokrasi | 87,6                   | -      | -     | -      | 87,6  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                        | Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                                          |              | 83              |                  |        |         |        |        |          | 82     |        |          |        |        |          | 30.281.285.972,00                  | SEKRETARIAT      |
|                                                                                   |                           |                           |                        |        |       |        |       |                                                                 | Meningkatkan Nilai IKM Perangkat Daerah                                          | Nilai IKM Perangkat Daerah                                                     |              | 87,00           |                  |        |         |        |        |          |        |        |          |        | 87,00  |          | 5.794.667.190,00                   | SEKRETARIAT      |
|                                                                                   |                           |                           |                        |        |       |        |       | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen      | 106             | 14               | 6      | 8       | 11     | 4      | 2        | 11     | 5      | 2        | 14     | 8      | 21       | 173.047.100,00                     | SEKRETARIAT      |
|                                                                                   |                           |                           |                        |        |       |        |       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                    | Dokumen      | 33              | 8                | 4      | 3       | 0      | 1      | 0        | 1      | 3      | 0        | 3      | 3      | 7        | 126.941.400,00                     | SEKRETARIAT      |
|                                                                                   |                           |                           |                        |        |       |        |       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah                               | Laporan      | 73              | 6                | 2      | 5       | 11     | 3      | 2        | 10     | 2      | 2        | 11     | 4      | 15       | 46.105.700,00                      | SEKRETARIAT      |
|                                                                                   |                           |                           |                        |        |       |        |       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan                  | Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan              | Persen       | 100 %           | 7,1 4%           | 7,1 4% | 14, 29% | 7,1 4% | 7,1 4% | 14, 29 % | 7,1 4% | 7,1 4% | 7,1 4%   | 7,1 4% | 7,1 4% | 7,1 4%   | 30.108.238.872,00                  | SEKRETARIAT      |
|                                                                                   |                           |                           |                        |        |       |        |       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                              | Orang/ Bulan | 94              | 97               | 97     | 194     | 97     | 97     | 194      | 97     | 97     | 97       | 94     | 94     | 94       | 30.108.238.872,00                  | SEKRETARIAT      |
|                                                                                   |                           |                           |                        |        |       |        |       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       | Meningkatkan Kapasitas ASN BPKPD                                                 | Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD                                        | Persen       | 100 ,00 %       | 0,0 0%           | 6,2 5% | 0,0 0%  | 0,0 0% | 6,2 5% | 0,0 0%   | 0,0 0% | 0,0 0% | 18, 75 % | 0,0 0% | 6,2 5% | 62, 50 % | 149.290.000,00                     | SEKRETARIAT      |
|                                                                                   |                           |                           |                        |        |       |        |       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya          | Menyediakan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                      | Paket        | 1               | 0                | 0      | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 1        | 61.690.000,00                      | SEKRETARIAT      |

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGE<br>T<br>KINERJ<br>A<br>SASAR<br>AN | TARGET  |          |           |          | PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                             | AKTIVITAS                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                     | SATUAN  | TAR<br>GET<br>KEG<br>IAT<br>AN | TARGET BULAN KE- |          |         |        |        |          |        |        |          |        |        |          | PERUBAHAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN 2025 (Rp) | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------------------------------------------|---------------------|
|                   |                           |                                          | TW<br>I | TW<br>II | TW<br>III | TW<br>IV |                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |         |                                | 1                | 2        | 3       | 4      | 5      | 6        | 7      | 8      | 9        | 10     | 11     | 12       |                                          |                     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan        | Melaksanakan Bimbingan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan undangan | Orang   | 8                              | 0                | 1        | 0       | 0      | 1      | 0        | 0      | 0      | 3        | 0      | 1      | 2        | 87.600.000,00                            | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum                                          | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum                                                   | Persen  | 100 %                          | 0,0 0%           | 11, 11 % | 27, 78% | 0,0 0% | 0,0 0% | 16, 67 % | 0,0 0% | 0,0 0% | 16, 67 % | 0,0 0% | 0,0 0% | 27, 78 % | 1.831.962.707,00                         | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan    | Paket   | 1                              | 0                | 0        | 1/4     | 0      | 0      | 1/4      | 0      | 0      | 1/4      | 0      | 0      | 1/4      | 40.750.000,00                            | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                        | Paket   | 3                              | 0                | 3        | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 506.466.740,00                           | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Menyediakan Peralatan Rumah Tangga                                                | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                   | Paket   | 1                              | 0                | 0        | 1/4     | 0      | 0      | 1/4      | 0      | 0      | 1/4      | 0      | 0      | 1/4      | 60.915.967,00                            | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Menyediakan Bahan Logistik Kantor                                                 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                    | Paket   | 1                              | 0                | 0        | 1/4     | 0      | 0      | 1/4      | 0      | 0      | 1/4      | 0      | 0      | 1/4      | 105.000.000,00                           | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan                          | Menyediakan Barang Cetakan dan Pengandaan                                         | Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan                            | Paket   | 1                              | 0                | 0        | 1       | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 389.323.000,00                           | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan          | Dokumen | 4                              | 0                | 0        | 1       | 0      | 0      | 1        | 0      | 0      | 1        | 0      | 0      | 1        | 106.000.000,00                           | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu                                            | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu                                               | Laporan | 4                              | 0                | 0        | 1       | 0      | 0      | 1        | 0      | 0      | 1        | 0      | 0      | 1        | 130.000.000,00                           | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                             | Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                   | Laporan | 4                              | 0                | 0        | 1       | 0      | 0      | 1        | 0      | 0      | 1        | 0      | 0      | 1        | 445.100.000,00                           | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Melaksanakan penatausahaan Arsip Dinamis                                          | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD                                  | Dokumen | 1                              | 0                | 0        | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 1        | 48.407.000,00                            | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah         | Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Kantor                                           | Persentase pemenuhan kebutuhan kantor                                                 | Persen  | 100 %                          | 0%               | 0%       | 0%      | 0%     | 0%     | 0%       | 0%     | 0%     | 0%       | 0%     | 0%     | 100 %    | 514.901.200,00                           | SEKRETARIAT         |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Menyediakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di sediakan                              | Unit    | 22                             | 0%               | 0        | 0%      | 0%     | 0%     | 0%       | 0%     | 0%     | 0%       | 0%     | 0%     | 220 0%   | 514.901.200,00                           | SEKRETARIAT         |

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN |                                                                                                                                                             | TARGE T KINERJ A SASAR AN | TARGET   |          |         |          | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                    | AKTIVITAS                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                      | SATUAN  | TAR GET KEG IAT AN | TARGET BULAN KE- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |                  | PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------------------|------------------------------------|------------------|
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           | TW I     | TW II    | TW III  | TW IV    |                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                        |         |                    | 1                | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11       | 12               |                                    |                  |
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           |          |          |         |          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | Melaksanakan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah               | Persen  | 100 %              | 38, 89 %         | 5,5 6% | 5,5 6% | 5,5 6% | 5,5 6% | 5,5 6% | 5,5 6% | 5,5 6% | 5,5 6% | 5,5 6% | 5,5 6%   | 1.836.850.000,00 | SEKRETARIAT                        |                  |
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           |          |          |         |          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Laporan | 12                 | 1                | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1        | 1.097.650.000,00 | SEKRETARIAT                        |                  |
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           |          |          |         |          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                          | Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan       | Laporan | 1                  | 1                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 88.000.000,00    | SEKRETARIAT                        |                  |
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           |          |          |         |          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                      | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | Laporan | 12                 | 1                | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1        | 651.200.000,00   | SEKRETARIAT                        |                  |
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           |          |          |         |          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Meningkatkan pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                     | Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                            | Persen  | 100 %              | 2,7 8%           | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 69, 44 % | 1.461.663.283,00 | SEKRETARIAT                        |                  |
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           |          |          |         |          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Melaksanakan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara         | Unit    | 70                 | 1/1 2            | 1/1 2  | 1/1 2  | 1/1 2  | 1/1 2  | 1/1 2  | 1/1 2  | 1/1 2  | 1/1 2  | 1/1 2  | 1/1 2    | 799.990.000,00   | SEKRETARIAT                        |                  |
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           |          |          |         |          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                       | Jumlah peralatan dan mesin lainnya                                                     | Unit    | 150                | 0                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 150      | 372.748.483,00   | SEKRETARIAT                        |                  |
|                   |                           |                                                                                                                                                             |                           |          |          |         |          | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor                                                                     | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi              | Unit    | 3                  | 0                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3        | 288.924.800,00   | SEKRETARIAT                        |                  |
|                   | 2                         | Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100%                      | 12, 04 % | 17, 59 % | 17, 59% | 52, 78 % | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                    | Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah                                                 | Persen  | 100 %              | 5,9 9%           | 3,9 6% | 3,9 6% | 4,2 3% | 8,3 9% | 9,3 4% | 7,5 6% | 6,7 5% | 2,2 0% | 8,7 7% | 5,3 6%   | 27, 67 %         | 698.228.526.542,00                 |                  |

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGE<br>T<br>KINERJ<br>A<br>SASAR<br>AN | TARGET  |          |           |          | PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | AKTIVITAS                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                                            | SATUAN  | TAR<br>GET<br>KEG<br>IAT<br>AN | TARGET BULAN KE- |       |       |       |       |       |       |         |       |         |         |         | PERUBAHAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN 2025 (Rp) | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------------------|
|                   |                           |                                          | TW<br>I | TW<br>II | TW<br>III | TW<br>IV |                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                              |         |                                | 1                | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8       | 9     | 10      | 11      | 12      |                                          |                     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | Menyelenggarakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                           | Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                 | Persen  | 100 %                          | 9,0 %            | 2,2 % | 2,2 % | 0,0 % | 5,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 18,18 % | 0,0 % | 18,18 % | 12,62 % | 22,73 % | 2.294.756.500,00                         | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026                                                                               | Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun                                                                         | Dokumen | 1                              | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0       | 1       | 0       | 79.684.000,00                            | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025                                                           | Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun                                                 | Dokumen | 1                              | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       | 79.684.000,00                            | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Tahun 2026                                                                       | Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi                                                                            | Dokumen | 59                             | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0       | 1       | 0       | 73.568.000,00                            | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tahun 2025                                                             | Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi                                                                  | Dokumen | 59                             | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 59    | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       | 73.568.000,00                            | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2025                                                                       | Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi                                                                            | Dokumen | 59                             | 59               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       | 67.003.500,00                            | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025                                                             | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi                                                                  | Dokumen | 59                             | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 59      | 0       | 0       | 69.893.500,00                            | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD           | Dokumen | 2                              | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 2       | 149.908.000,00                           | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 2                              | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 2       | 0       | 0       | 159.960.000,00                           | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | Dokumen | 4                              | 0                | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 2       | 567.391.000,00                           | BIDANG ANGGARAN     |
|                   |                           |                                          |         |          |           |          | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          | Dokumen | 1                              | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 1       | 567.698.000,00                           | BIDANG ANGGARAN     |

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN |  | TARGE T KINERJ A SASAR AN | TARGET |       |        |       | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                            | AKTIVITAS                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                               | SATUAN  | TAR GET KEG IAT AN | TARGET BULAN KE- |        |        |          |          |          |         |        |        |          |        |          | PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp) | PENANGGUNG JAWAB               |                 |
|-------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                   |                           |  |                           | TW I   | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |         |                    | 1                | 2      | 3      | 4        | 5        | 6        | 7       | 8      | 9      | 10       | 11     | 12       |                                    |                                |                 |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |         |                    |                  |        |        |          |          |          |         |        |        |          |        |          |                                    |                                |                 |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                    | Melaksanakan Pembinaan Penganggaran Daerah Kepada OPD, Kecamatan, dan BLUD                                                                              | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah Kabupaten/Kota                                                                             | Orang   | 318                | 0                | 0      | 0      | 0        | 200      | 0        | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      | 118      | 0                                  | 406.398.500,00                 | BIDANG ANGGARAN |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | Menyelenggarakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                       | Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                     | Persen  | 100 %              | 10, 42 %         | 4,1 7% | 4,1 7% | 10, 42 % | 4,1 7%   | 4,1 7%   | 22, 92% | 4,1 7% | 4,1 7% | 10, 42 % | 4,1 7% | 16, 67 % | 404.198.000,00                     | BIDANG PERBENDAHARAA N         |                 |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    | Melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                           | Dokumen | 236                | 59               | 0      | 0      | 59       | 0        | 0        | 59      | 0      | 0      | 59       | 0      | 0        | 49.970.000,00                      | BIDANG PERBENDAHARAA N         |                 |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen | 12                 | 1                | 1      | 1      | 1        | 1        | 1        | 1       | 1      | 1      | 1        | 1      | 1        | 195.752.000,00                     | BIDANG PERBENDAHARAA N         |                 |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank         | Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Keuangan Bukan Bank                 | Dokumen | 2                  | 0                | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 1       | 0      | 0      | 0        | 0      | 1        | 26.266.000,00                      | BIDANG PERBENDAHARAA N         |                 |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                         | Melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Pajak dan Menyusun Laporan pph atas laporan penerimaan kas                                                           | Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                         | Dokumen | 12                 | 1                | 1      | 1      | 1        | 1        | 1        | 1       | 1      | 1      | 1        | 1      | 1        | 132.210.000,00                     | BIDANG PERBENDAHARAA N         |                 |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                         | Menyelenggarakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                     | Persentase Koodinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                    | Persen  | 100 %              | 1,6 8%           | 6,6 2% | 6,6 2% | 3,7 2%   | 20, 91 % | 30, 43 % | 4,5 6%  | 1,8 6% | 1,8 6% | 3,7 2%   | 1,8 6% | 1,8 6%   | 538.751.500,00                     | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN |                 |
|                   |                           |  |                           |        |       |        |       | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                             | Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                             | Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                   | Dokumen | 14                 | 0                | 1      | 1      | 2        | 1        | 1        | 2       | 1      | 1      | 2        | 1      | 1        | 73.996.000,00                      | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN |                 |

# PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | TARGET |       |        |       | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          | AKTIVITAS                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                        | SATUAN  | TARGET KEGIATAN | TARGET BULAN KE- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          | PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp) | PENANGGUNG JAWAB               |
|-------------------|---------------------------|------------------------|--------|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
|                   |                           |                        | TW I   | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |         |                 | 1                | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12       |                                    |                                |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                     | Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | Laporan | 17              | 2                | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1        | 111.588.000,00                     | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                           | Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                | Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi                                                                                                           | Laporan | 3               | 0                | 1      | 1      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 134.514.000,00                     | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 2               | 0                | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 123.528.500,00                     | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                               | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | Orang   | 108             | 0                | 0      | 0      | 0      | 0      | 108    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 45.805.000,00                      | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                            | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                                                                   | Lembaga | 41              | 0                | 0      | 0      | 0      | 41     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 49.320.000,00                      | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                  | Menyelenggarakan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                   | Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                       | Persen  | 100 %           | 2,7 8%           | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 2,7 8% | 69, 44 % | 694.990.820.542,00                 | BIDANG PERBENDAHARAAN          |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                     | Melaksanakan Penyaluran Dana Desa, Alokasi dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa                                                                                                           | Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan                                                                                                                                | Laporan | 12              | 1                | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1        | 645.565.440.000,00                 | BIDANG PERBENDAHARAAN          |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                    | Melaksanakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                          | Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak                                                                                                                                               | Laporan | 1               | 0                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1        | 31.275.717.582,00                  | BIDANG PERBENDAHARAAN          |
|                   |                           |                        |        |       |        |       | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                               | Melaksanakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                     | Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | Laporan | 1               | 0                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1        | 18.149.662.960,00                  | BIDANG PERBENDAHARAAN          |



PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS                                            | INDIKATOR KINERJA SASARAN |                                                                                       | TARGE<br>T<br>KINERJ<br>A<br>SASAR<br>AN | TARGET  |          |           |          | PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                          | AKTIVITAS                                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                                   | SATUAN  | TAR<br>GET<br>KEG<br>IAT<br>AN | TARGET BULAN KE- |        |         |        |        |         |         |        |          |        |          |                  | PERUBAHAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN 2025 (Rp)                   | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          | TW<br>I | TW<br>II | TW<br>III | TW<br>IV |                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                     |         |                                | 1                | 2      | 3       | 4      | 5      | 6       | 7       | 8      | 9        | 10     | 11       | 12               |                                                            |                     |
| Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel | 3                         | Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan | 83,49 %                                  | -       | -        | -         | 83,49 %  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                        | Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                            | Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan               | Persen  | 89 %                           | 0%               | 0%     | 0%      | 0%     | 0%     | 0%      | 0%      | 0%     | 0%       | 0%     | 89 %     | 1.516.293.500,00 | BIDANG ASET DAERAH                                         |                     |
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          |         |          |           |          | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                | Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                            | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                          | Persen  | 100 %                          | 2,0 8%           | 2,0 8% | 14, 58% | 2,0 8% | 2,0 8% | 14, 58% | 2,0 8%  | 2,0 8% | 14, 58 % | 2,0 8% | 39, 58 % | 1.516.293.500,00 | BIDANG ASET DAERAH                                         |                     |
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          |         |          |           |          | Penyusunan Standar Harga                                                       | Menyusun Standar Harga Tahun 2027 dan Standar Harga Perubahan Tahun 2025                                                                    | Jumlah Standar Harga yang disusun                                                                   | Dokumen | 2                              | 0                | 0      | 0       | 0      | 0      | 1       | 0       | 0      | 0        | 0      | 1        | 100.915.000,00   | BIDANG ASET DAERAH                                         |                     |
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          |         |          |           |          | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                           | Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2026                                                                               | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah                                                        | Dokumen | 1                              | 0                | 0      | 0       | 0      | 0      | 1       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0        | 19.088.000,00    | BIDANG ASET DAERAH                                         |                     |
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          |         |          |           |          | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                 | Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah yaitu:<br>1. Melaksanakan Pensertifikatan BMD sebanyak 600 sertifikat<br>2 Membuat 55 Plang BMD | Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah                                                 | Laporan | 2                              | 0                | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 2        | 1.011.747.500,00 | BIDANG ASET DAERAH                                         |                     |
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          |         |          |           |          | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah               | Melaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                               | Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah               | Laporan | 12                             | 1                | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1       | 1      | 1        | 1      | 1        | 384.543.000,00   | BIDANG ASET DAERAH                                         |                     |
| Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah                        | 4                         | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah                                                   | 51,16 %                                  | -       | -        | -         | 51,16 %  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                          | Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                              | Persentase Pengelolaan Pajak Daerah                                                                 | Persen  | 100 %                          | 4,2 2%           | 4,5 7% | 3,1 9%  | 8,5 3% | 3,1 9% | 2,8 4%  | 14, 57% | 2,5 0% | 20, 00 % | 5,0 0% | 3,8 8%   | 27, 50 %         | 5.112.067.770,00                                           |                     |
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          |         |          |           |          | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                         | Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                              | Persentase Pengelolaan Pajak Daerah                                                                 | Persen  | 100 %                          | 4,2 2%           | 4,5 7% | 3,1 9%  | 8,5 3% | 3,1 9% | 2,8 4%  | 14, 57% | 2,5 0% | 20, 00 % | 5,0 0% | 3,8 8%   | 27, 50 %         | 5.112.067.770,00                                           |                     |
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          |         |          |           |          | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           | Melaksanakan studi banding                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                     | Dokumen | 1                              | 0                | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 1      | 0        | 0      | 0        | 133.049.500,00   | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah |                     |
|                                                              |                           |                                                                                       |                                          |         |          |           |          | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Dokumen | 1                              | 0                | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 1      | 0        | 0      | 1        | 168.283.000,00   | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah |                     |

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN |  | TARGE<br>T<br>KINERJ<br>A<br>SASAR<br>AN | TARGET  |          |           |          | PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | AKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                  | SATUAN         | TAR<br>GET<br>KEG<br>IAT<br>AN | TARGET BULAN KE- |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | PERUBAHAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN 2025 (Rp) | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                    |                                                                        |
|-------------------|---------------------------|--|------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                   |                           |  |                                          | TW<br>I | TW<br>II | TW<br>III | TW<br>IV |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                |                                | 1                | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |                                          |                                                                        |                                                                        |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah                                                                               | Melaksanakan Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan Pajak<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah laporan<br>penyuluhan dan<br>penyebarluasan<br>kebijakan pajak daerah                                       | Laporan        | 4                              | 0                | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 147.919.500,00                           | Bidang<br>Perencanaan dan<br>Pengembangan<br>Pendapatan Asli<br>Daerah |                                                                        |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                                           | Menyediakan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah sarana dan<br>prasarana pengelolaan<br>pajak daerah                                                         | Unit           | 39                             | 0                | 0        | 1        | 3        | 2        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 33       | 2.137.308.250,00                         | Bidang Pelayanan<br>Pajak Daerah                                       |                                                                        |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek<br>Pajak Daerah                                                                                          | Melaksanakan Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek PBB-<br>P2dengan target sebagai berikut:<br>1. Pendataan 500 objek pajak<br>bangunan baru dan data baru<br>PBB-P2<br>2. Pendataan 20 objek pajak<br>khusus PBB-P2<br>3. Pendataan dan pemutakhiran<br>50 Objek Pajak non PBB-P2                                            | Jumlah laporan hasil<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek Pajak<br>Daerah, Subjek pajak<br>dan Wajib pajak daerah | Laporan        | 1                              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                        | 228.548.500,00                                                         | Bidang<br>Perencanaan dan<br>Pengembangan<br>Pendapatan Asli<br>Daerah |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Penilaian Pajak Bumi<br>dan Bangunan<br>Perdesaan dan<br>Perkotaan (PBBP2)<br>serta Bea Perolehan<br>Hak atas Tanah dan<br>Bangunan (BPHTB) | Melaksanakan Penilaian Pajak<br>Bumi dan Bangunan Perdesaan<br>dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea<br>Perolehan Hak atas Tanah dan<br>Bangunan (BPHTB)                                                                                                                                                                         | Jumlah objek pajak yang<br>d disesuaikan NJOP nya                                                                  | Objek<br>Pajak | 49                             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 49       | 75.397.000,00                            | Bidang<br>Perencanaan dan<br>Pengembangan<br>Pendapatan Asli<br>Daerah |                                                                        |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Pelayanan dan<br>Konsultasi Pajak<br>Daerah                                                                                                 | Melaksanakan Pelayanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah layanan dan<br>konsultasi pajak daerah                                                                      | Layanan        | 1                              | 1/1<br>2         | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1/1<br>2 | 1.057.149.320,00                         | Bidang Pelayanan<br>Pajak Daerah                                       |                                                                        |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Penelitian dan<br>Verifikasi Data<br>Pelaporan Pajak<br>Daerah                                                                              | Melaksanakan Penelitian dan<br>Verifikasi Data Pelaporan Pajak<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah data pelaporan<br>pajak daerah yang telah<br>dilakukan penelitian dan<br>verifikasi                         | Dokumen        | 12                             | 1                | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 53.752.700,00                            | Bidang Pelayanan<br>Pajak Daerah                                       |                                                                        |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Penagihan Pajak<br>Daerah                                                                                                                   | Melaksanakan Penagihan Pajak<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen hasil<br>pelaksanaan penagihan<br>pajak daerah                                                      | Dokumen        | 12                             | 1                | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 820.252.000,00                           | Bidang Pelayanan<br>Pajak Daerah                                       |                                                                        |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah                                                                              | Melaksanakan Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan Pengawasan<br>Pajak Daerah dengan tahapan<br>sebagai berikut:<br>1. Melaksanakan Rapat Evaluasi<br>PAD<br>2. Melaksanakan Rapat<br>Penyusunan dan Perubahan<br>Target PAD<br>3. Melaksanakan Rapat Evaluasi<br>PBB-P2<br>4. Melaksanakan Penertiban 70<br>Objek Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil<br>pemeriksaan serta<br>pengendalian dan<br>pengawasan pajak<br>daerah                        | Dokumen        | 4                              | 0                | 0        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 186.264.000,00                           | Bidang<br>Perencanaan dan<br>Pengembangan<br>Pendapatan Asli<br>Daerah |                                                                        |

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN |  | TARGE<br>T<br>KINERJ<br>A<br>SASAR<br>AN | TARGET  |          |           |          | PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                  | AKTIVITAS                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                          | SATUAN  | TAR<br>GET<br>KEG<br>IAT<br>AN | TARGET BULAN KE- |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PERUBAHAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN 2025 (Rp) | PENANGGUNG<br>JAWAB |                                                            |
|-------------------|---------------------------|--|------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                           |  |                                          | TW<br>I | TW<br>II | TW<br>III | TW<br>IV |                                                                        |                                                              |                                                                            |         |                                | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                                          |                     |                                                            |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          |                                                                        |                                                              |                                                                            |         |                                |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                          |                     |                                                            |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Melaksanakan Pembinaan kepada OPD pengelola retribusi daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | 1                              | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1                                        | 24.217.000,00       | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah |
|                   |                           |  |                                          |         |          |           |          | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | Melaksanakan high level meeting implementasi ETPD Tahun 2025 | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah    | Dokumen | 1                              | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1                                        | 79.927.000,00       | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah |
| JUMLAH            |                           |  |                                          |         |          |           |          |                                                                        |                                                              |                                                                            |         |                                |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 740.932.840.974,00                       |                     |                                                            |

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Aksi ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan organisasi, serta perkembangan pelaksanaan program pada tahun berjalan. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, ketercapaian target kinerja, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Rencana Aksi yang telah diperbaharui ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga pelaksanaannya tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prinsip good governance. Oleh karena itu, seluruh unsur pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah agar menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Aksi ini disusun dengan harapan dapat memberikan arahan yang jelas dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas serta fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi referensi dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tasikmalaya, November 2025  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



**Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M**  
NIP. 19681008 198803 1 003